

**PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0059 TAHUN 2013 TENTANG
PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA
(Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

ANGGIT BRILIANTIN

NIM. 0910111002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0059 TAHUN 2013 TENTANG
PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA**

(Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang)

Anggit Brilliantin, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: anggitbriliantin@gmail.com

ABSTRAK

Anggit Brilliantin, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2014, *Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Berdasarkan Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang*, Agus Yulianto, S.H., M.S., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Penulisan skripsi ini penulis membahas tentang langkah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya klasifikasi bentuk pengembangan kepemimpinan pemuda berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi, bagaimana pelaksanaan pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota Malang, apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai instansi yang berwenang terhadap pengembangan kepemimpinan pemuda, serta bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut. Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulis mengkaji peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang menyebutkan klasifikasi bentuk pengembangan kepemimpinan pemuda. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam upaya pelaksanaan tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang belum efektif dalam mengimplementasikan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Hal tersebut dikarenakan faktor pendanaan yang harus dibagi dengan bidang lainnya di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. Selain itu, banyaknya organisasi di Kota Malang tidak menjamin banyaknya kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut. Organisasi tersebut belum berperan secara efektif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Kurangnya sosialisasi kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang berakibat sedikit sekali pemuda yang berminat terhadap kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Dinas kepemudaan dan Olahraga maupun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Kota Malang.

Kata kunci: pengembangan kepemimpinan pemuda, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda.

ABSTRACT

In writing this paper the author discusses the steps the Department for Youth and Sports Affairs Malang in implementing youth leadership development activities in Malang city. This is motivated by the presence of youth leadership development has classification based on Article 4 of the Regulation of the Minister of Youth and Sports of the Republic of Indonesia Number 0059 Year 2013 About Youth Leadership Development. The problems examined in this study include, how the implementation of Article 4 of Regulation of the Minister of Youth and Sports of the Republic of Indonesia Number 0059 Year 2013 About Youth Leadership Development in Malang, what barriers faced by the Department for Youth and Sports Affairs Malang as the competent authority to the development of youth leadership, and how the solution in the face of these problems. To find out the existing problems, the method used is the sociological juridical approach, where the author reviewing existing regulations, namely Regulation of the Minister of Youth and Sports of the Republic of Indonesia Number 0059 Year 2013 About Youth Leadership Development which states shape classification youth leadership development. Based on the results of the study, the authors obtained answers to the problems that exist, that in the implementation of the Department for Youth and Sports Affairs Malang has not been effective in implementing Article 4 of the Regulation of the Minister of Youth and Sports of the Republic of Indonesia Number 0059 Year 2013 About Youth Leadership Development. That is because the funding factor that should be shared with other areas of the Department for Youth and Sports Affairs Malang. In addition, many organizations in Malang does not guarantee the number of events held by the organization. The organization has not effectively participate in the development of youth leadership. Lack of socialization of youth leadership development activities by the Department for Youth and Sports Affairs Malang resulted in very few youth who are interested in the activities carried out by both the youth and the Department of Sports and Youth Community Organization in Malang.

Key Words: youth leadership development, youth community organizations

A. Latar Belakang Masalah

Pemuda ialah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Di zaman sekarang, pemuda selalu dikaitkan dengan masalah nilai. Di dalam masyarakat, pemuda dianggap sebagai suatu identitas yang potensial dan penuh harapan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan dapat lebih memajukan bangsa di kemudian hari. Pemuda memiliki beberapa kedudukan dalam pertanggungjawabannya atas tatanan masyarakat. Antara lain¹,

1. Kemurnian idealisme pemuda;
2. Keberanian dan keterbukaan pemuda dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru;
3. Semangat pengabdian;
4. Spontanitas dan dinamikanya;
5. Inovasi dan kreativitas pemuda;
6. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru;

¹ <http://taufikhidayah21.wordpress.com/> diakses pada 20 September 2013

7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri.

Negara juga sudah menjamin adanya kepastian hukum terhadap pemuda dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Hadirnya Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program dan kegiatan perlindungan proses pembangunan dan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Undang-Undang ini juga bertujuan agar terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan kepemudaan. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Sebagai generasi penerus bangsa, setiap pemuda harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, karena lambat laun, generasi pemuda sekarang ini akan menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Oleh karena itu, pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang. Pengembangan kepemimpinan pemuda merupakan kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda. Pada pelaksanaannya, pemuda saja tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan pembangunan kepemudaan. Disamping itu dibutuhkan juga faktor penunjang yang dapat membantu terlaksananya pembangunan kepemudaan tersebut. Faktor yang sangat penting dalam terlaksananya pembangunan kepemudaan ini adalah, peran serta pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas dalam melayani kegiatan kepemudaan. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Di dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, pemerintah daerah harus membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda pasal 4, menyebutkan bahwa pengembangan kepemimpinan pemuda dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Pendidikan;
2. Pelatihan;
3. Pengaderan;
4. Pembimbingan;
5. Pendampingan;
6. Forum Kepemimpinan pemuda.

Sekarang ini, yang menjadi permasalahan dalam suatu pengembangan kepemimpinan pemuda adalah menentukan kriteria pemuda yang dapat dijadikan sebagai pemimpin dalam organisasi kepemimpinan pemuda tersebut. Tidak mudah seseorang menjadi ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi kepemudaan tersebut. Sebagai ketua, pemuda harus memiliki jiwa kepemimpinan dalam menangani organisasi agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai melalui peran pemuda dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, pemuda

harus memahami perilaku individu dalam organisasi dan memahami tentang teori dan teknik kepemimpinan. Dalam faktanya, seorang ketua atau pemimpin bisa jadi usianya tidak termasuk dalam rentang usia pemuda sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Sistem pengaderan bagi anggota forum kepemimpinan pemuda juga merupakan suatu permasalahan yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Dukungan dari negara berupa pembinaan pemuda sangat membantu pengembangan kepemimpinan pemuda ini. Oleh karena itu diperlukannya peran serta pejabat yang berwenang mengenai pelaksanaan pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang berada di bawah naungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

B. Permasalahan

dari latar belakang, penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota Malang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pelaksanaan pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota Malang?
3. Bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam upaya pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Malang?

C. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*socio empiris*). Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yakni internalisasi hukum dalam pranata sosial, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian diteruskan dengan menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah, dan yang terakhir berupa pencarian penyelesaian masalah. Hal tersebut berfungsi untuk mengkaji pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota Malang. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang, yaitu di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang yang merupakan instansi yang berwenang melakukan pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda dan memberi fasilitas untuk kegiatan tersebut. Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Remaja dan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, observasi lapangan dan studi dokumentasi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *interview* dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan analisa data Analisis kualitatif dengan menggunakan landasan teori dalam menafsirkan data atau gejala. Teknik analisis data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan analisis data deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan keadaan dari kasus yang diteliti kemudian dianalisis berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul

ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan umum². Penggunaan data kuantitatif yang digunakan untuk mempertajam analisis kualitatif.

D. Pembahasan

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Kota Malang dapat diartikan antara lain dengan nasib yang kurang beruntung atau baik, menghalangi atau membentang (dalam bahasa jawa), nama yang diberikan oleh pasukan Sultan Demak ketika mencoba menyerang untuk memperluas daerah kekuasaan yang berasal dari kata atau istilah Malang Melintang, dan kata Malang yang berarti bahwa Tuhan menghancurkan yang bathil dan menegakkan kebaikan yang berasal dari istilah Malang Kucecwaru. Nama “Malang” berasal dari nama sebuah Candi yaitu Candi Malang Kucecwaru yang terletak di kaki Gunung Buring dan dibangun pada abad ke 15.

Situasi kota yang tenang, penduduknya ramah, harga makanan yang relatif murah dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat cocok untuk belajar dan menempuh pendidikan, hal tersebut yang melatarbelakangi pembangunan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas. Sebagai kota pendidikan, tentunya banyak pemuda yang menetap di Kota Malang baik pemuda asli Kota Malang maupun pemuda pendatang. Pendidikan bukan hanya didapat melalui ilmu akademik dari lembaga pendidikan, namun dalam hal pengembangan kepemimpinan pemuda pendidikan merupakan salah satu usaha yang bertujuan agar pemuda peserta didik mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kebangsaan yang berkembang³. Selain pendidikan, pengembangan kepemimpinan pemuda dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan forum kepemimpinan pemuda baik melalui pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan atau organisasi kepemudaan.

2. Keadaan Umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang

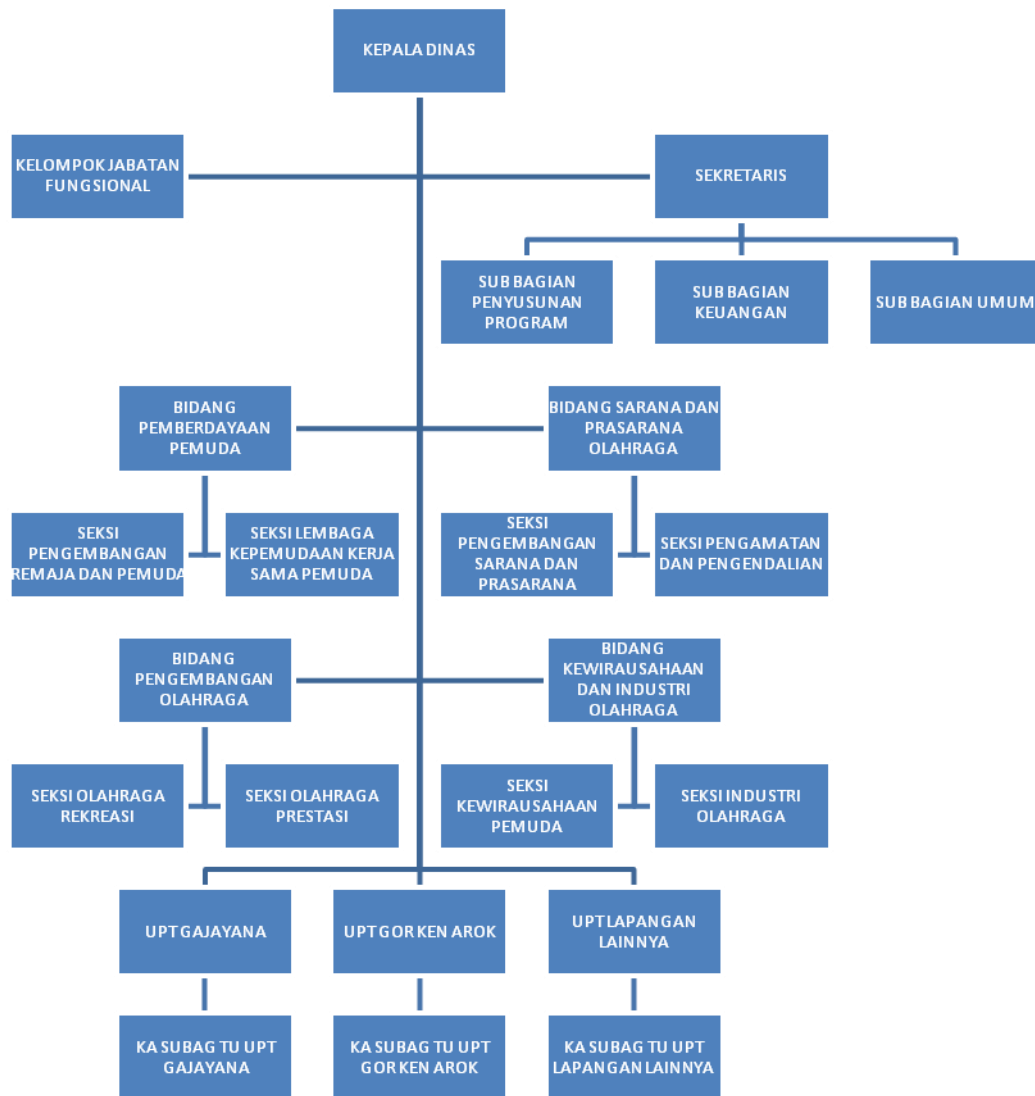
a. Struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang

Bagan

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang

² Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 121.

³ Pasal 5 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda



b. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dapat diuraikan sebagai berikut⁴:

- 1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kepemudaan dan olahraga;

⁴Pasal 3 Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- c) pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pemuda dan lembaga serta kerja sama kepemudaan;
 - d) pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga prestasi dan rekreasi;
 - e) pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - f) pelaksanaan kegiatan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
 - g) pemberian rekomendasi kegiatan dan atau pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - h) pemberian stimulan peralatan kewirausahaan, pengembangan potensi pemuda dan olahraga;
 - i) pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - j) pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangannya;
 - k) pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - m) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - n) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - o) pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
 - p) pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
 - q) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - r) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - s) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - t) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - u) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - v) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
 - w) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - x) penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
 - y) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - z) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
- c. Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang
- 1) Visi

terwujudnya pemuda sehat melalui olahraga yang berprestasi dengan didukung fasilitas olahraga yang berkualitas menuju pelayanan publik yang prima di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

2) Misi

- a) Mewujudkan pemuda berprestasi. Sehat, produktif, inovatif dan mempunyai daya saing melalui menumbuhkembangkan potensi kepemudaan dan jiwa interpresuer,

- b) Mewujudkan insane olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakatkan,
- c) Meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas,
- d) Mewujudkan pelayanan aparatur yang prima di bidang kepemudaan dan olahraga.

B. Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang

Pemuda merupakan tulang punggung bangsa, pernyataan tersebut mengartikan bahwa pentingnya peran serta pemuda dalam kemajuan suatu bangsa. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun, dimana pemuda tersebut dapat berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda melalui kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di Kota Malang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang melakukan pengembangan kepemimpinan pemuda melalui:

1. Pendidikan, merupakan proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang melaksanakan proses pendidikan tersebut bekerja sama dengan dinas lainnya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing pemuda. Contohnya dalam meningkatkan pengetahuan kepemimpinan dalam hal kewirausahaan maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Pelatihan, merupakan kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan ketrampilan kepemimpinan pemuda. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang mengadakan diklat sebagai kegiatan simulasi dan praktik. Diklat tersebut ditujukan untuk membangun karakter kepemimpinan pemuda. Kegiatan tersebut biasanya berupa outbond yang diikuti oleh sebagian besar organisasi kemasyarakatan pemuda dan mahasiswa perguruan tinggi yang diundang.
3. Pengaderan, merupakan proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang menyerahkan kekuasaan penuh kepada Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam menentukan anggota, baik struktur pengurus maupun pengaderan. Sehingga pengaderan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda merupakan hak Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Dinas Kepemudaan dan Olahraga hanya sebagai pengawas.
4. Pembimbingan, merupakan proses pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kepemimpinan pemuda. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang melakukan pembimbingan dengan cara melakukan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan pemuda untuk menyelenggarakan kegiatan yang sudah dicantumkan dalam kalender tahunan. Dalam pembuatan proposal kegiatan, organisasi kemasyarakatan tersebut dibimbing oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang agar proposal tersebut sesuai dan dapat diterima dengan baik.
5. Pendampingan, merupakan proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda. Pelaksanaan

pendampingan yang selama ini dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang berjalan efektif. Pendampingan tersebut dilaksanakan sejak proses penyeleksian sampai proses pelaksanaan kegiatan pemuda tersebut. Pendampingan ini harus sesuai anggaran Dinas kepemudaan dan olahraga Kota Malang, karena fasilitas dana sudah diatur dalam kalender rutin tahunan. Pejabat yang berwenang mendampingi harus memberikan pengarahan dan penjelasan mengenai kegiatan kepemudaan tersebut dan turut berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pemuda.

6. Forum kepemimpinan pemuda, merupakan wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda. Dalam pengembangan kepemimpinan pemuda melalui forum kepemimpinan pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang mengatur adanya seminar atau lokakarya dalam kalender tahunannya. Kegiatan tersebut melibatkan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda untuk menyebarkan brosur kegiatan, membantu proses penyeleksian kegiatan dan pembinaan ke jenjang yang lebih tinggi. Fasilitas yang diberikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang antara lain, memberikan honor dan fasilitas penunjang lainnya.

Diklat kepemimpinan pemuda yang diadakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dapat dikatakan meliputi semua bentuk pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Kegiatan diklat tersebut biasanya diisi dengan kegiatan outbond, seminar, dialog dan lain-lain yang melibatkan anggota organisasi kemasyarakatan pemuda dan mahasiswa perguruan tinggi.

Organisasi kemasyarakatan pemuda di Kota Malang membentuk sendiri peraturan organisasi termasuk di dalamnya struktur organisasi dan sistem pengaderan. Dinas kepemudaan dan olahraga Kota Malang hanya sebagai pengawas dan merupakan badan yang bertugas mengidentifikasi data organisasi kemasyarakatan pemuda di Kota Malang. Kerja sama yang dilakukan Dinas kepemudaan dan olahraga Kota Malang dengan Organisasi kemasyarakatan pemuda ini meliputi sosialisasi kegiatan melalui penyebaran brosur-brosur maupun media cetak. Selain itu, Dinas kepemudaan dan olahraga Kota Malang bersama Organisasi kemasyarakatan pemuda membantu proses penyeleksian dan pembinaan pemuda ke jenjang yang lebih tinggi dalam suatu kegiatan untuk mewakili Kota Malang di tingkat nasional. Kerja sama ini menguntungkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang karena telah dibantu oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam memenuhi kalender rutin tahunan dengan terselenggaranya proses sosialisasi kegiatan dan pelaksanaan penyeleksian tersebut.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam melaksanakan kegiatan kepemimpinan pemuda mengacu pada beberapa dasar hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
3. Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai pemerintah daerah yang berwenang dalam memberikan

kemudahan dan fasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Prosedur atau langkah dalam memberikan fasilitas pengembangan kepemimpinan pemuda tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang mengacu pada perencanaan kegiatan tahunan yang tertuang dalam RENSTRA DISPORA KOTA MALANG (Rencana Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang). Renstra merupakan turunan dari RPJM Kota Malang (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). RPJM tersebut berlaku selama lima tahun sedangkan Renstra tersebut merupakan perencanaan kegiatan tahunan yang agenda kegiatannya dibagi per tahun sesuai dengan RPJM. Sehingga semua kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda baik melalui pelatihan maupun yang lainnya sudah tertata melalui perencanaan kegiatan tahunan. Meskipun RPJM berlaku selama lima tahun, namun pada akhir tahun diadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahunan yang telah diatur di dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. Dalam evaluasi pelaksanaan di akhir tahun tersebut, pemerintah daerah mempertanggungjawabkan apakah kegiatan tahunan yang sudah dilaksanakan tersebut dapat dikatakan sukses, baik sukses secara pelaksanaan maupun sukses administrasi.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mengembangkan potensi pemuda di Kota Malang. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor Nasional

Kepeloporan merupakan akumulasi dari semangat, sikap dan kesukarelawan yang dilandasi kesadaran diri atas tanggung jawab sosial untuk menciptakan sesuatu dan atau mengubah gagasan menjadi suatu karya nyata yang dilaksanakan secara konsisten, gigih yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diakui pemerintah⁵.

Pemilihan pemuda pelopor menganut sistem terbuka, artinya pemuda pelopor dapat dicalonkan oleh masyarakat luas, antara lain oleh organisasi pemuda, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah, pers, dan lain-lain. Agar diperoleh pemuda pelopor yang memiliki kualitas terbaik, maka seleksi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi sampai tingkat nasional⁶. Kegiatan yang diajukan oleh pemuda tersebut sudah dijalankan atau sudah dapat dibuktikan minimal 2 (dua) tahun sebelum mendaftar menjadi pemuda pelopor. Oleh karena itu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang harus mendatangi tempat kegiatan yang telah diadakan oleh pemuda tersebut untuk mengungkap fakta bahwa kegiatan tersebut sudah berjalan minimal 2 (dua) tahun.

Menurut Bapak Budi Sulisty, S.H. sebagai seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Remaja dan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, penyeleksian pemuda pelopor di Kota Malang kurang diminati oleh masyarakat. Sedangkan sosialisasi seleksi pemuda pelopor sudah digerakkan dengan menyebar brosur dan undangan ke kecamatan-kecamatan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan pemuda. Pada kenyataannya, pelajar dan mahasiswa lebih berminat pada kegiatan ini daripada masyarakat sendiri. Namun yang paling disayangkan bahwa pelajar atau mahasiswa tersebut kebanyakan bukan orang Malang asli. Mereka merupakan pendatang dari daerah lain. Sehingga pengembangan pemuda Kota Malang didominasi oleh pemuda pendatang.

⁵ Buku pedoman pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor nasional hlm. 01

⁶ *Ibid.* hlm. 08

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai pejabat yang berwenang dalam penSeleksian pemuda pelopor memberikan beberapa fasilitas untuk mengembangkan potensi pemuda pelopor Kota Malang. Fasilitas tersebut antara lain:

- a. Fasilitas tempat seleksi;
- b. Fasilitas konsumsi selama seleksi;
- c. Fasilitas transport pemuda pelopor;
- d. Mengundang ahli dari perguruan tinggi atau dinas yang terkait atau lembaga yang berwenang.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemuda Pelopor dari Kementerian Kepemudaan dan Olahraga Republik Indonesia, macam-macam pemuda pelopor adalah⁷:

- a. Kewirausahaan, kepeloporan di bidang kewirausahaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan atau mengembangkan inovasi produk, yang bertumpu atau berbasis pada sumber daya lokal, sehingga memiliki nilai tambah, seperti sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi memiliki nilai ekonomi, serta dapat menumbuhkan wirausaha baru dilingkungannya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- b. Pendidikan, merupakan upaya yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan atau mengembangkan inovasi teknologi pendidikan, metode pembelajaran, dan/atau pengembangan alat bantu pembelajaran, yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar baik formal, non formal, maupun informal, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sumberdaya, saran dan prasarana pendidikan.
- c. Teknologi tepat guna, merupakan upaya yang dilakukan oleh pemuda dalam menciptakan dan/atau mengembangkan rancang bangun teknologi sederhana yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi permasalahan atau mempermudah kehidupan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Seni budaya dan pariwisata, merupakan suatu rangkaian kegiatan secara terpadu dalam menciptakan kreasi dan/atau pelestarian dan pengembangan yang dapat menggugah apresiasi seni budaya dan pariwisata dikalangan masyarakat serta dapat mengangkat citra bangsa Indonesia yang bermanfaat dalam promosi pariwisata Indonesia.
- e. Kelautan/ kebaharian, merupakan prakarsa dan perintisan pemuda dalam memelihara dan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan, meliputi sumber daya laut, biotalaut, pantai dan/atau terumbu karang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Pelaksanaan Pemilihan Paskibra Nasional

Dalam pemilihan PASKIBRAKA Kota Malang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang bertindak sebagai penSeleksi paskibraka yang akan menjadi perwakilan ke tingkat provinsi. Sedangkan yang menSeleksi paskibraka di tingkat SMU/SMK di Kota Malang untuk menjadi Paskibraka Kota Malang adalah kewenangan Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang.

⁷ Buku pedoman pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor nasional hlm. 06

Dalam pemilihan paskibraka yang akan mewakili Kota Malang di tingkat provinsi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang bekerja sama dengan PPI (Purna Paskibra Indonesia). Beberapa kota akan digabung menjadi satu rayon yang terdiri dari 5 (lima) kota. Kota Malang bersama Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu berkumpul menjadi satu rayon. Dari satu rayon, diambil 5 (lima) pasang paskibraka yang nantinya akan diseleksi lagi hingga tersisa 2 pasang saja dari masing-masing rayon. Satu pasang sebagai tim inti, satu pasang sebagai tim cadangan.

Fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, antara lain:

- a. Pembimbingan selama penyeleksian;
- b. Fasilitas sarana dan prasarana untuk seleksi;
- c. Fasilitas konsumsi dan pelatihan;
- d. Fasilitas transport.

3. Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)

Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) adalah media mempertemukan wakil pemuda seluruh Indonesia dan merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kepemudaan dan Olahraga. Melalui kegiatan ini para pemuda juga diharapkan dapat mengembangkan dirinya melalui proses interaksi dengan budaya dan kreativitas lokal. Hasil yang diharapkan dari diadakannya Bakti Pemuda Antar Provinsi ini adalah:

- a. Tertanamnya rasa nasionalisme, rasa kesatuan dan persatuan dalam wadah NKRI;
- b. Melalui kegiatan ini diharapkan ada transformasi nilai budaya, teknologi, keunggulan daerah, pengembangan potensi, wawasan dan kreativitas menuju kemandirian pemuda;
- c. Menciptakan jaringan informasi dan komunikasi dikalangan peserta.

Menurut Bapak Budi Sulisty, S.H., banyak sekali kriteria penilaian agar para peserta seleksi bisa melaju ke tingkat provinsi di antaranya terkait dengan seni budaya, kebangsaan maupun kewirausahaan. Dengan adanya kegiatan ini, pihaknya berharap pemuda di Kota Malang lebih mampu meningkatkan kualitasnya secara nyata.

Dalam menyelenggarakan seleksi, pihak Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang bekerja sama dengan PPMI (Purna Prakarya Muda Indonesia) Kota Malang. Pendaftaran BPAP di Kota Malang juga dapat melalui PPMI. Proses penyeleksian dari tingkat kota, dan pendampingan pada tingkat provinsi dan nasional difasilitasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang.

C. Hambatan yang Dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Budi Sulisty, S.H. selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Remaja dan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, ada beberapa hambatan yang dihadapi Dinas kepemudaan dan olahraga Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Faktor penghambat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Faktor penghambat internal

Faktor penghambat internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari Dinas kepemudaan dan olahraga Kota Malang sendiri. Pada pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang menjadi faktor penghambat internal adalah faktor pendanaan. Struktur organisasi Dinas kepemudaan dan olahraga Kota Malang terdapat beberapa bidang, yaitu:

- a. Bidang pemberdayaan pemuda;
 - 1) Seksi pengembangan remaja dan pemuda;
 - 2) Seksi kelembagaan dan kerja sama pemuda.
- b. Bidang pengembangan olahraga;
 - 1) Seksi olahraga rekreasi;
 - 2) Seksi olahraga prestasi.
- c. Bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - 1) Seksi pengembangan sarana dan prasarana;
 - 2) Seksi pemanfaatan dan pengendalian.
- d. Bidang kewirausahaan pemuda dan industri olahraga;
 - 1) Seksi kewirausahaan pemuda;
 - 2) Seksi industri olahraga.

Pendanaan tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, dalam mengucurkan dana tersebut Bidang pemberdayaan pemuda masih harus berhati-hati dan teliti agar pendanaan tersebut tidak sia-sia dan dapat mendanai semua kegiatan pemberdayaan pemuda yang tercantum dalam kalender kegiatan tahunan.

Pendanaan sering kali menjadi penghambat kegiatan pemerintah untuk masyarakat. Sehingga pemerintah harus berfikir bagaimana caranya agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik tanpa mengandalkan pendanaan dari APBD (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah).

2. Faktor penghambat eksternal

Faktor penghambat eksternal merupakan faktor penghambat yang berasal bukan dari Dinas kepemudaan dan olahraga Kota Malang. Faktor penghambat tersebut berasal dari lingkungan atau masyarakat luar.

Ada begitu banyak organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, namun tidak semua organisasi kepemudaan tersebut berperan secara aktif dalam menyelenggarakan kegiatan. Banyaknya organisasi kemasyarakatan di Kota Malang dapat dikatakan belum berperan secara efektif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Kebanyakan dari organisasi kemasyarakatan pemuda tersebut jarang melakukan aktifitas organisasi yang dapat mengembangkan kepemimpinan pemuda. Jika organisasi tersebut ingin mengadakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda, organisasi tersebut dapat mengajukan

proposal kepada Dinas kepemudaan dan olahraga Kota Malang untuk memfasilitasi kegiatan tersebut asal sesuai anggaran dan tidak bertentangan dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang.

Pada kenyataannya, mayoritas pelaku organisasi dalam organisasi kemasyarakatan pemuda tidak memenuhi kriteria pemuda secara jenjang usia. Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Para pelaku organisasi pemuda yang aktif tersebut mayoritas berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda usia 16 – 30 tahun yang seharusnya aktif dalam organisasi kemasyarakatan pemuda tersebut malah kurang berminat dalam mengikuti organisasi kemasyarakatan pemuda.

Pemuda yang mengikuti organisasi kemasyarakatan berjumlah sedikit. Tidak adanya identifikasi data organisasi kemasyarakatan pemuda mengakibatkan pemuda enggan bergabung dengan organisasi kemasyarakatan tersebut. Sehingga pemuda merasa tidak memiliki wadah dalam mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Selain itu, masalah sosialisasi kegiatan masih menjadi alasan yang paling krusial mengapa agenda kegiatan kepemimpinan pemuda sepi peminat. Lebih disayangkan lagi, diklat atau kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda yang sudah pernah diadakan oleh Dinas kepemudaan dan olahraga Kota Malang maupun organisasi kemasyarakatan pemuda sepi peminat dari pemuda Kota Malang sendiri.

Kurangnya minat pemuda terhadap kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda dapat dikarenakan pemuda tersebut tidak memiliki wadah yang resmi dalam menyalurkan kegiatannya. Sehingga kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga hanya diikuti oleh sedikit pemuda sehingga kegiatan tersebut menjadi kurang kompetitif.

D. Solusi dalam Menghadapi Hambatan yang Dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam Upaya Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Dari beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu adanya solusi yang harus dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang.

Maka solusi dalam menghadapi hambatan internal yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam pelaksanaan pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan di Kota Malang adalah dengan menjalin kemitraan dengan lembaga lain dalam hal pendanaan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang harus kreatif dalam mengatur pendanaan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Salah satu hal yang dapat menunjang pendanaan tersebut adalah dengan bekerja sama dengan lembaga lain tanpa ada satu pihak yang merasa dirugikan. Kemitraan dengan lembaga lain tersebut juga memiliki manfaat dalam pemberdayaan pemuda agar pemuda tetap dapat berkembang di bawah naungan instansi yang berwenang dalam mengembangkan potensinya.

Pendanaan pengembangan kepemimpinan pemuda tersebut dapat diperoleh melalui organisasi kepemudaan, masyarakat dan organisasi lainnya serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 37

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.

Kemitraan sebagai kerjasama usaha yang telah dipilih oleh pemerintah untuk mengembangkan potensi dan pemberdayaan pemuda, melibatkan beberapa pihak yaitu:

1. Pemrakarsa, para pemrakarsa adalah pengusaha besar baik swasta maupun BUMN yang bersedia menjalin kemitraan lembaga lain.
2. Mitra Usaha yaitu lembaga lain yang dapat dipertimbangkan menjadi peserta dalam kemitraan pengembangan pemuda dan mendukung kegiatan pemberdayaan pemuda. Mitra usaha tersebut antara lain:
3. Pemerintah yang berwenang dalam hal koordinasi, fasilitasi dan pengawasan. Dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan pemerintah yang berwenang dalam koordinasi, fasilitasi dan pengawasan.

Pendanaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sangat tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut juga meliputi prioritas sektor pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang. Pembiayaan tersebut harus memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan potensi pemuda agar kegiatan pengembangan tersebut berjalan lancar dan pemuda tersebut menjadi lebih ahli di bidangnya. Kegiatan pengembangan pemuda tersebut tidak boleh bertentangan dengan Rencana Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang

Selain itu, solusi dalam menghadapi hambatan eksternal yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam pelaksanaan pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan di Kota Malang adalah dengan mengadakan identifikasi data organisasi kemasyarakatan pemuda. Identifikasi merupakan suatu kegiatan dalam mencatat dan melakukan pendaftaran untuk organisasi kemasyarakatan pemuda agar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang memiliki data organisasi kemasyarakatan pemuda guna mengetahui jumlah dan jenis bidang kegiatan organisasi kemasyarakatan pemuda yang ada di wilayah Kota Malang.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang belum dapat terlaksana secara efektif. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan sarana prasarana, faktor pendanaan dan kurangnya kesadaran pemuda untuk mengikuti kegiatan pengembangan kepemudaan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan pengembangan pemuda dinilai kurang sehingga banyak masyarakat dan pemuda yang tidak mengetahui adanya kegiatan pengembangan pemuda yang diadakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Minimnya informasi tersebut dapat dikarenakan kurangnya minat masyarakat dan pemuda terhadap kegiatan pengembangan pemuda tersebut dan dapat juga dikarenakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang kurang memberikan sosialisasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga menjadikan indikator bahwa peraturan ini belum dapat diimplementasikan secara efektif. Diklat menjadi kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Malang yang sudah dicatat dalam kalender tahunan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang yang mencakup semua bentuk pengembangan kepemimpinan pemuda seperti

yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.

Dalam upaya pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Malang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang meminta bantuan kepada organisasi kemasyarakatan pemuda dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda tersebut. Selain bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang juga menjalin kemitraan dengan beberapa pihak termasuk didalamnya perguruan tinggi maupun instansi lain yang terkait. Bentuk kerja sama tersebut antara lain mengadakan sosialisasi kegiatan, pembagian brosur, pendanaan dan pemberian fasilitas. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai instansi yang berwenang ditugaskan memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Beberapa kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda yang diadakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai penerapan pasal tersebut adalah:

- 1) Pelaksanaan Pemilihan Pemuda Pelopor Nasional;
 - 2) PASKIBRAKA;
 - 3) Bhakti Pemuda Antar Provinsi
- b. Hambatan yang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam upayanya melaksanakan pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Malang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Adapun yang menjadi kendala adalah sebagai berikut :

1) Faktor Internal

Yang menjadi faktor hambatan dari dalam (internal) adalah faktor pendanaan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang terdiri dari beberapa bidang. Sehingga pendanaan terhadap kegiatan kepemudaan dan olahraga harus dibagi sama rata untuk masing-masing bidang.

2) Faktor Eksternal

Yang menjadi faktor hambatan dari luar (eksternal) diantaranya kurangnya minat pemuda terhadap kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dan Organisasi kemasyarakatan pemuda terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda. Hal tersebut menyebabkan regenerasi dalam suatu organisasi kemasyarakatan pemuda tidak berjalan dengan baik.

- c. Solusi dalam menghadapi hambatan yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam upayanya melaksanakan pengembangan kepemimpinan di Kota Malang, antara lain :

- 1) Solusi dalam menghadapi hambatan internal adalah pemerintah daerah mengadakan kerja sama atau kemitraan dengan perguruan tinggi atau instansi yang terkait untuk mengatasi permasalahan pendanaan. Pendanaan tersebut dapat juga berupa fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 37 peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.

- 2) Solusi dalam menghadapi hambatan eksternal adalah adanya upaya identifikasi data organisasi kemasyarakatan pemuda di Kota Malang yang diadakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. Identifikasi merupakan suatu kegiatan dalam mencatat dan melakukan pendaftaran untuk organisasi kemasyarakatan pemuda agar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang memiliki data organisasi kemasyarakatan pemuda guna mengetahui jumlah dan jenis bidang kegiatan organisasi kemasyarakatan pemuda yang ada di wilayah Kota Malang.

2. Saran

a. Bagi Pemerintah Kota Malang

Pemerintah Kota Malang seharusnya dapat lebih memberikan perhatian terhadap sedikitnya kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Malang. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang seharusnya bukan menjadi penghalang untuk mengembangkan kepemimpinan pemuda di Kota Malang. Pemuda merupakan aset bangsa, dan Kota Malang merupakan kota dengan populasi pemuda yang banyak seharusnya pemerintah Kota Malang dapat memberikan perhatian lebih dan membantu Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan sosialisasi kegiatan dan kerja sama yang baik antar instansi yang terkait.

b. Bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang

Dalam pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang harus lebih menggerakkan organisasi kemasyarakatan pemuda dalam mensosialisasikan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda agar lebih kompetitif. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang diharapkan dapat mengoptimalkan perannya sebagai pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Malang, dan melakukan koordinasi antar instansi terkait sangat perlu dilakukan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dapat juga berkoordinasi dengan instansi-instansi yang dapat membantu kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda.

c. Bagi Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat penting dalam kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda, oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan dan membantu mensosialisasikan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda sehingga kegiatan tersebut dapat diminati oleh lebih banyak pemuda. Kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda memiliki tujuan yang mulia dalam memajukan dan mempersiapkan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka hendaknya masyarakat mendukung dan berkontribusi secara aktif untuk membantu proses kemajuan bangsa melalui pengembangan kepemimpinan pemuda sehingga tujuan dari pembuatan peraturan tersebut dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Buku pedoman pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor nasional

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Surabaya.

Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Cipta Karya, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wiratno, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Penerit Universitas Trisakti, Jakarta.

Thoha Miftah, 2005, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dr Kartini Kartono, 2013, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Fajar, mukti dan Yulianto, Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soemitro, Ronnny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Internet

<http://taufikhidayah21.wordpress.com/> diakses pada 20 September 2013

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-implementasi-kebijakan-publik.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2013

<http://celoteh-galang.blogspot.com/2012/10/pemuda-sosialisasi-identitas-perguruan.html> diakses pada tanggal 20 September 2013

<http://softskills-ilmubudaya.blogspot.com/2012/11/pemuda-dan-sosialisasi.html> diakses pada 20 Oktober 2013

<http://onemillionsensation.wordpress.com/2012/10/12/makalah-teori-organisasi-umum-1/> diakses pada tanggal 20 September 2013

Website resmi Kota Malang, <http://malangkota.go.id> diakses Tanggal 22 November 2013.